

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab hasil dan pembahasan ini, dapat diungkapkan kondisi kota Bandar Lampung secara makro, dimana dari 30 kelurahan yang diteliti terungkap bagaimana karakteristik dan faktor-faktor yang secara nyata menyebabkan terciptanya kekumuhan di Kota Bandar Lampung pada umumnya dan di daerah penelitian pada khususnya.

A. Karakteristik Permukiman di Daerah Penelitian

1. Karakteristik Hunian Daerah Penelitian

a. Kualitas Bangunan dan kelayakan bangunan

Hasil analisis data pada penelitian diperoleh hasil bahwa kualitas dan kelayakan bangunan di wilayah pesisir hampir seluruhnya bangunan yang tidak permanen, yaitu sebesar 90 % katagori 4 (51-70 %), sisanya 10 % katagori 3 (31- 50 %). Sementara di wilayah non pesisir hanya sebesar 60 % katagori 4, 35 % katagori 3 dan ada yang masuk katagori 2 sebesar 5 %.

Untuk Kelayakan bangunan di wilayah pesisir hampir seluruhnya katagori 2 (11- 30 %) yaitu sebesar 80%, sementara di wilayah non pesisir didominasi oleh katagori 3 (31- 50%) sebesar 65 %. Kondisi ini dimungkinkan karena di wilayah pesisir sering terjadi genangan air sehingga mereka

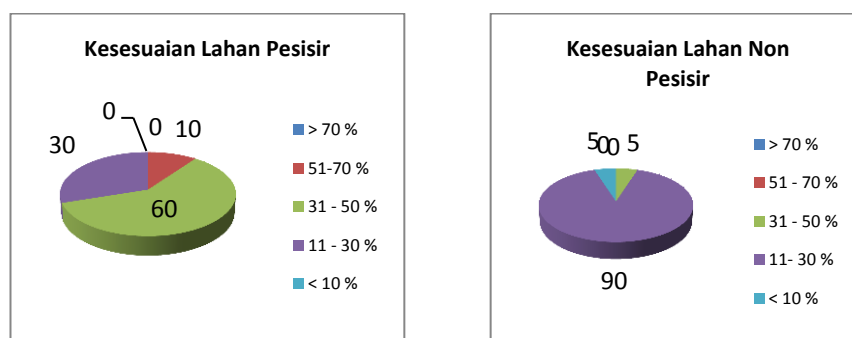
cenderung untuk memakai material bangunan seperti dinding, plafon dan lantai yang lebih kuat dibandingkan dengan yang ada di wilayah non pesisir.

b. Tingkat Kepadatan Bangunan

Bangunan-bangunan di daerah penelitian menunjukkan variasi tiap-tiap kelurahan, untuk daerah padat penduduk dan pusat kota seperti teluk betung memiliki kepadatan bangunan katagori 4 yaitu antara 151 – 200 unit/ ha, namun untuk daerah yang kepadatan penduduknya kecil dan tidak masuk dalam kawasan ataupun perdagangan dan industri seperti kelurahan panjang utara, maka kepadatan bangunan dikatagorikan 1 sampai 2 dengan kepadatan kurang dari 50 unit/Ha atau paling padat 100 unit/ Ha.

c. Kesesuaian Lahan dan Status Kepemilikan Penggunaan Bangunan

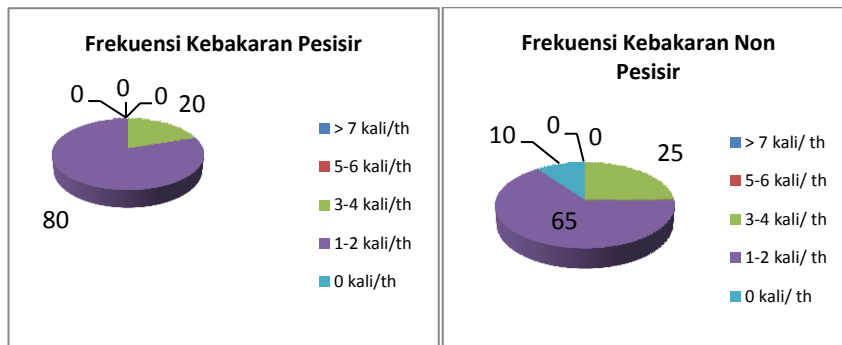
Kesesuaian Lahan dan status kepemilikan ini akan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan permukiman, pada umumnya untuk yang tidak sesuai dengan RUTR terjadi di sekitar bantaran sungai, tepi rel kereta api seperti di kelurahan Gunung Sari dan Srengsem. Di bawah ini dapat diilustrasikan kondisi kesesuaian lahan dan status kepemilikan di daerah penelitian.



Gambar 4.1 Kesesuaian Lahan Daerah Penelitian

a. Frekuensi Kebakaran dan Frekuensi Kebanjiran

Frekuensi kebakaran dan frekuensi banjir juga merupakan indikator suatu kawasan diakatorikan kumuh atau tidak. Pada umumnya jika kepadatan bangunan suatu wilayah cukup padat, kemungkinan terjadinya kebakaran lebih besar dibandingkan dengan kawasan yang tidak memiliki kepadatan bangunan yang padat, demikian juga sering tidaknya suatu kawasan banjir dapat menunjukkan bahwa kawasan yang sering banjir di daerah itu banyak saluran yang tersumbat diakibatkan banyak sampah yang menumpuk dan menyebabkan meluapnya air ke permukiman apabila musih hujan tiba. Dari Hasil penelitian ini, yang mempunyai frekuensi banjir sering di antaranya Kelurahan Way Lunik, Teluk Betung dan daerah dataran rendah lainnya. Sedangkan untuk daerah yang masuk ke dataran yang agak tinggi seperti Kelurahan Gunung Sari banjir tidak terjadi karena air limpasan hujan pasti turun ke daerah yang lebih rendah.



Gambar 4.2. Frekuensi Kebakaran di daerah penelitian

2. Karakteristik Penghuni Daerah Penelitian

a. Kondisi Ekonomi

(1) Tingkat Pendapatan

Menurut hasil survei dan pengamatan yang dilakukan di daerah penelitian tingkat pendapatan rata-rata di daerah penelitian, diperoleh hasil ternyata wilayah non pesisir lebih variatif dibandingkan wilayah pesisir, di wilayah pesisir ada 3 katagori di wilayah non pesisir ada 4 katagori, namun ada kesamaan di kedua wilayah, dimana tingkat pendapatan sebagian besar katagori 3 (16 – 25 %). Untuk lebih jelasnya tingkat pendapatan untuk masing-masing katagori di kedua wilayah dapat dilihat pada tabel 4.1. sebagai berikut:

Tabel 4.1. Prosentase Tingkat Pendapatan Di Daerah Penelitian

Tingkat Pendapatan	Wilayah Pesisir	Wilayah Non Pesisir
Lebih besar 35 %	0,00	5,00
26 – 35 %	30,00	15,00
16 – 25 %	50,00	65,00
6 – 15 %	20,00	15,00
Kurang dari 6 %	0,00	5,00

Sumber : Analisis Data ,2015

(2) Tingkat Kemiskinan

Dari hasil penelitian yang diperoleh di daerah penelitian ternyata sangat memprihatinkan, karena hampir seluruh kelurahan memiliki tingkat kemiskinan lebih dari 35 %, hanya ada 2 kelurahan yang tingkat kemiskinannya dibawah 35 %, yaitu kelurahan Tanjung Seneng dan kelurahan Way Kandis. Hal ini mengidentifikasi bahwa sebagian besar Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung masih dikatagorikan keluarga pra sejahtera atau keluarga sejahtera I. Lebih Jelasnya Tingkat Kemiskinan di Daerah Penelitian dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Tingkat Kemiskinan di Daerah Penelitian

Nama Kelurahan	Wilayah	Tingkat Kemiskinan
Panjang Selatan	Pesisir	56,65
Panjang Utara	Pesisir	47,78
Srengsem	Pesisir	64,72
Way Lunik	Pesisir	76,49
Karang Maritim	Pesisir	52,92
Kota Karang	Pesisir	53,79
Keteguhan	Pesisir	49,44
Sukamaju	Pesisir	54,67
Teluk Betung	Pesisir	58,36
Pesawahan	Pesisir	69,71
Labuhan Ratu	Non Pesisir	46,61
Kampung Baru	Non Pesisir	63,75
Kedaton	Non Pesisir	40,06
Surabaya	Non Pesisir	56,36
Panengahan	Non Pesisir	45,05
Kemiling Permai	Non Pesisir	44,31
Gedong Air	Non Pesisir	50,08
Gunung Sari	Non Pesisir	53,95
Tanjung Seneng	Non Pesisir	28,77
Way Kandis	Non Pesisir	34,56
Pasir Gintung	Non Pesisir	60,41
Kaliawi	Non Pesisir	55,93
Gotong Royong	Non Pesisir	55,66
Palapa	Non Pesisir	62,14
Kelapa Tiga	Non Pesisir	57,72
Durian Payung	Non Pesisir	76,77
Rajabasa	Non Pesisir	55,51
Rajabasa Jaya	Non Pesisir	53,97
Gedong Meneng	Non Pesisir	48,40
Rajabasa Raya	Non Pesisir	52,00

Sumber: Analisis Data, 2015

b. Kondisi Sosial

(1) Tingkat Kerawanan Keamanan

Umumnya tingkat kerawanan berada pada katagori 3 (3-4 kali/th) di wilayah pesisir, dan katagori 2 (1-2 kali/th) di wilayah non pesisir. Kondisi lingkungan seperti ini dapat dikatakan relatif aman, dan menunjukkan bahwa di wilayah pesisir lebih rawan dibandingkan wilayah non pesisir. Pada umumnya kejahatan yang ada adalah pencurian, sedangkan konflik antar warga cenderung

tidak terjadi, karena adanya hubungan kekerabatan yang erat antar warga atau berasal dari daerah yang sama. Hal ini juga disebabkan oleh persamaan latar belakang sosial budaya dan ekonomi antar penduduk, sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial di masyarakat.

(2) Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat pendidikan penduduk wilayah non pesisir yang dikategorikan tamat pendidikan dasar 9 tahun sangat kecil yaitu kategori 2 (1- 5 %) saja, sedangkan di wilayah pesisir ternyata cukup besar yaitu sebagian besar kategori 3 (6 – 10 %), berarti masih ada 6 -10% penduduk wilayah pesisir belum dapat pendidikan dasar 9 tahun. Rendahnya tingkat pendapatan, menyebabkan faktor pendidikan tidak menjadi prioritas utama dalam keluarga. Dengan demikian penilaian dari aspek pendidikan terhadap masyarakat di daerah penelitian terdapat lebih dari 5% penduduk tidak menamatkan pendidikan dasar 9 tahun.

c. Kondisi Kependudukan

(1) Tingkat Kepadatan Penduduk

Secara tingkat kepadatan, menunjukan bahwa Kota Bandar Lampung secara menyeluruh masih memiliki cukup lahan untuk dapat menampung jumlah penduduk yang ada. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang memiliki kepadatan penduduk lebih dari 250 jiwa/ Ha hanya kelurahan Kota Karang , Gotong Royong dan kelurahan Teluk Betung. Sedangkan Kelurahan lain memiliki kepadatan penduduk kurang dari 150 jiwa/Ha.

(2) Jumlah Anggota Rumah Tangga

Rumah umumnya dihuni oleh 4 – 6 orang (63,6%) dan lebih dari 6 orang (27,3%) yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya. Jumlah Rumah Tangga yang terdapat di daerah penelitian, umumnya tiap rumah di huni oleh satu keluarga dengan jumlah anak rata-rata 2 – 4 orang, sehingga jumlah anggota keluarga tidak lebih dari 10 orang. Sedangkan jumlah Kepala keluarga dalam satu rumah umumnya hanya terdapat 1 keluarga dalam satu rumah. Adapun warga pendatang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan penduduk setempat, umumnya membangun sendiri rumah mereka di sekitar perumahan yang ada. Hal ini menyebabkan ketidakteraturan lingkungan, rumah yang tidak tertata, berupa lorong tikus, tanpa jalan, dan tanpa garis sempadan bangunan.

(3) Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data jumlah penduduk pada Tahun 2011 dan tahun 2012 diketahui bahwa kecenderungan penambahan penduduk bertambah rata-rata 2,5% per tahun. Hal ini nampak dari semakin padatnya permukiman di sekitar tepian sungai dan area sungai. Kecenderungan ini menyebabkan semakin tidak tertatanya lingkungan permukiman dan perumahan di sebagian besar daerah penelitian, sehingga diperlukan penataan permukiman dan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman yang layak. Antisipasi Pemda setempat diharapkan dapat dilakukan sebagai upaya untuk memberikan permukiman yang layak bagi masyarakat di daerah penelitian khususnya dan di Kota Bandar Lampung pada umumnya.

(4) Angka Status Gizi Balita

Keterbatasan ekonomi, kondisi lingkungan dan bangunan yang tidak layak, menyebabkan rendahnya status gizi balita pada lokasi. Berdasarkan

penilaian status gizi balita, terdapat 10 – 30% balita berada di bawah garis merah dengan kondisi sosial ekonomi rendah. Kondisi tersebut hingga saat ini belum mengalami perubahan signifikan, masalah ekonomi masih menjadi penyebab rendahnya status gizi balita.

(5) Angka Kesakitan dan Kematian

Penyakit yang banyak diderita oleh penduduk di daerah penelitian adalah diare yang sebagian besar diderita oleh anak-anak. Salah satu penyebab dari penyakit tersebut adalah kondisi lingkungan; kondisi sarana dan prasarana lingkungan yang tidak layak, antara lain pelayanan air bersih, sanitasi lingkungan, persampahan dan saluran air. Upaya perbaikan sarana & prasana lingkungan yang telah dilaksanakan belum efektif akibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan, serta sarana & prasarana lingkungan menjadi kendala utama dalam perbaikan lingkungan.

3. Karakteristik Sarana Prasarana

a. Tingkat Pelayanan Air Bersih

Berdasarkan data dari BPS, pelayanan air bersih sebagian besar penduduk tidak terlayani PDAM, mereka ada yang menggunakan sumur gali ataupun dengan pelayanan air bersih umum, seperti yang terjadi di Desa Srengsem Kecamatan Panjang. Di daerah penelitian sebagian besar penduduk belum memperoleh air bersih dari saluran PAM sebesar 60 % katagori 5 (> 70 %) terutama yang bermukim di wilayah pesisir, namun bagi penduduk yang bermukim di wilayah non pesisir 50 % katagori 5. Hal ini menunjukkan pelayanan air bersih di wilayah non pesisir masih lebih baik dibandingkan wilayah pesisir.

b. Kondisi Sanitasi Lingkungan

Dari kondisi sanitasi lingkungan, penelitian ini hanya melihat dari segi pemakaian jamban keluarga. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa wilayah pesisir sanitasi lingkungannya lebih buruk daripada wilayah non pesisir, tidak ada katagori 1 (< 10 %) yang belum memakai jamban, sedangkan di wilayah non pesisir ada sebesar 15 % masuk katagori 1. Hal ini kemungkinan disebabkan juga adanya kebiasaan penduduk di wilayah pesisir yang membuang kotoran di air laut.

c. Kondisi Persampahan

Kondisi pelayanan persampahan di wilayah pesisir cenderung lebih buruk, karena dari hasil penelitian terlihat bahwa ada sebesar 60 % yang masuk katagori 3 (31-50 %), di wilayah non pesisir hanya 25 %, sementara wilayah pesisir juga tidak ada yang masuk katagori 1, di wilayah non pesisir ada sebesar 15% yang termasuk katagori 1. Tidak adanya armada angkutan sampah dan tempat pembuangan sampah sementara yang memadai menyebabkan penduduk lebih memilih cara yang mudah dilakukan dan tempat yang mudah dijangkau. Dari cara membuang sampah penduduk, dapat dikatakan bahwa sebagian besar (51- 70 %) penduduk membuang sampah di tempat yang bukan peruntukannya.

d. Kondisi Saluran Air Hujan / drainase

Umumnya kualitas drainase lingkungan di daerah penelitian kurang baik, yaitu sekitar 11 s.d 30 persen drainase buruk, namun secara keseluruhan wilayah pesisir lebih buruk dari wilayah non pesisir, dimana wilayah non pesisir masih

memiliki drainase buruk kurang dari 10 persen sebesar 15 %, sedangkan wilayah pesisir tidak ada Kelurahan yang drainase buruknya lebih kecil dari 10 persen. Hal ini tampak dari visualisasi yang dilakukan di lapangan. (Gambar 4.3.).



Gambar 4.3. Kondisi sanitasi/ wc yang memanfaatkan laut, drainase yang kotor dan pembuangan sampah di lokasi permukiman.

e. Kondisi Jalan

Terdapat kesamaan antara wilayah pesisir dan wilayah non pesisir 90% jalan lingkungan dan jalan setapak yang memiliki kondisi yang baik dan hanya 10% lahan yang belum terlayani jalan, dengan pola letak jalan dan perumahan yang belum tertata dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan hanya sebagian kecil kelurahan di daerah penelitian yang belum terlayani jalan.

f. Kondisi Ruang Terbuka

Tapak ruang terbuka di daerah penelitian, umumnya merupakan lahan tidak terurus yang ditumbuhi tanaman liar, yang juga dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Untuk permukiman wilayah pesisir setengah (50 %) hanya terdapat 5-7,5 % ruang terbuka, sehingga penduduk tidak dapat memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk menanam tanaman. Di kawasan tepian sungai hanya nampak tanah kosong yang dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah dan

menambahkan perahu, Sedangkan di daerah non pesisir ternyata lebih kecil persentase ruang terbukanya yaitu 2,5 -5,0 % sebesar 60 persen.

Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa di daerah penelitian tingkat kekumuhan dikategorikan sebagian agak kumuh ($2,40 \leq TK \leq 2,70$) sebesar 10 kelurahan dan kumuh ($TK > 2,70$) sebesar 10 kelurahan, sedangkan yang dikategorikan tidak kumuh ($TK < 2,40$) sebesar 10 kelurahan. Di daerah pesisir seluruh kelurahan di daerah penelitian dikategorikan kumuh dan agak kumuh, sementara di daerah non pesisir ada beberapa variasi, hal ini menunjukkan bahwa secara deskriptif anggapan sebagian besar masyarakat yang mengatakan bahwa wilayah pesisir cenderung lebih kumuh dibandingkan wilayah non pesisir terbukti pada hasil penelitian ini. Untuk lebih jelasnya persebaran tingkat kekumuhan di daerah penelitian dapat dilihat pada tabel 4.2. Persebaran Tingkat Kekumuhan di Daerah Penelitian.

Tabel 4.2 Persebaran Tingkat Kekumuhan miskin di Daerah Penelitian

Nama Kelurahan	Wilayah	Tingkat Kekumuhan
Panjang Selatan	Pesisir	Kumuh (2,84)
Panjang Utara	Pesisir	Kumuh (2,93)
Srengsem	Pesisir	Agak Kumuh (2,56)
Way Lunik	Pesisir	Kumuh (2,74)
Karang Maritim	Pesisir	Agak Kumuh (2,63)
Kota Karang	Pesisir	Kumuh (3,06)
Keteguhan	Pesisir	Kumuh (2,72)
Sukamaju	Pesisir	Kumuh (2,71)
Teluk Betung	Pesisir	Kumuh (3,17)
Pesawahan	Pesisir	Agak Kumuh (2,60)
Labuhan Ratu	Non Pesisir	Agak Kumuh (2,54)
Kampung Baru	Non Pesisir	Tidak Kumuh (2,12)
Kedaton	Non Pesisir	Tidak Kumuh (2,20)
Surabaya	Non Pesisir	Tidak Kumuh (2,13)
Panengahan	Non Pesisir	Tidak Kumuh (2,13)
Kemiling Permai	Non Pesisir	Agak Kumuh (2,40)
Gedong Air	Non Pesisir	Tidak Kumuh (2,25)
Gunung Sari	Non Pesisir	Kumuh (2,94)
Tanjung Seneng	Non Pesisir	Tidak Kumuh (1,44)
Way Kandis	Non Pesisir	Tidak Kumuh (2,19)
Pasir Gintung	Non Pesisir	Agak Kumuh (2,55)
Kaliawi	Non Pesisir	Kumuh (2,89)
Gotong Royong	Non Pesisir	Kumuh (2,77)
Palapa	Non Pesisir	Agak Kumuh (2,65)
Kelapa Tiga	Non Pesisir	Agak Kumuh (2,70)
Durian Payung	Non Pesisir	Agak Kumuh (2,60)
Raja Basa	Non Pesisir	Agak Kumuh (2,46)
Rajabasa Jaya	Non Pesisir	Tidak Kumuh (2,22)
Gedong Meneng	Non Pesisir	Tidak Kumuh (2,37)
Rajabasa Raya	Non Pesisir	Tidak Kumuh (2,20)

Sumber: Analisis Data, 2015

B. Faktor-faktor yang menyebabkan permukiman kumuh di daerah penelitian

Berdasarkan hasil analisis Regresi Logistik Ordinal, dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 4.4. Kesimpulan Hasil Analisis Regresi Logistik Ordinal

Predictor	Coef	SE Coef	Z	P	Odds Ratio	lower	upper	Keterangan
Const (1)	-39,3247	13,9336	-2,82	0,005				
Const (2)	-35,0000	13,1668	-2,66	0,008				
Kependudukan								
Kepadatan Penduduk [PDTP]	2,54223	1,07197	2,37	0,018	12,71	1,55	103,88	berpengaruh
Jumlah Anggota Rumah Tangga [RART]	0,28616	0,75815	0,38	0,706	1,33	0,30	5,88	Tidak berpengaruh
Sosial Ekonomi								
Tingkat Pendidikan [TPDIK]	-0,46355	2,00459	-0,23	0,817	0,63	0,01	31,99	Tidak Berpengaruh
Tingkat Kerawanan Keamanan [TKMAN]	0,90441	1,00653	0,90	0,369	2,47	0,34	17,76	Tidak Berpengaruh
Tingkat Kemiskinan [TKIN]	5,33320	2,79171	1,91	0,056	207,10	0,87	49258,93	Berpengaruh
Sarana dan Prasarana								
Pelayanan Air Bersih [PYSIH]	3,99117	1,63526	2,44	0,015	54,12	2,19	1334,38	Berpengaruh
Kondisi Jalan [JLN]	-0,20411	1,29543	-0,16	0,875	0,82	0,06	10,33	Tidak Berpengaruh
Ruang Terbuka [RT]	4,08552	2,48619	1,64	0,100	59,47	0,46	7772,70	Berpengaruh
Fisik								
Keseuaian Lahan [KL]	3,22812	1,55503	2,08	0,038	25,23	1,20	531,62	Berpengaruh

Sumber: Analisis Data, 2015

Dari tabel hasil regresi logistik ordinal menunjukkan bahwa H_0 ditolak apabila nilai signifikansi semua parameter variabel independen yang masuk model lebih kecil dari $\alpha = 10\%$, artinya paling tidak ada satu parameter variabel independen tidak sama dengan nol. Variabel yang signifikan secara bersama-sama

mempengaruhi tingkat kekumuhan adalah kepadatan penduduk [PDTP], Tingkat Kemiskinan [TKIN], pelayanan air bersih [PYSIH], ruang terbuka [RT], dan Keseuaian Lahan [LT].

Berdasarkan hasil analisis tersebut , Coef $\beta_2 = 1,07197$ odds ratio = 12,7, *P value* = 0,018, makna dari hasil tersebut adalah bahwa tingkat kepadatan penduduk berpengaruh positif (*P* = 0,018). Dalam hal ini jika nanti kelurahan yang kepadatan penduduknya Jarang (katagori 1) berkembang menjadi berkepadatan sedang (katagori 2) atau yang sekarang berkepadatan sedang berkembang menjadi padat (katagori 3), maka tingkat kekumuhan mengalami peningkatan sebesar 12,71 kali semula. Berdasarkan teori pertumbuhan penduduk, hal ini sangat dimungkinkan terjadi karena jika penduduk semakin bertambah, maka kebutuhan hidup baik papan, sandang maupun kebutuhan fasilitas lain semakin meningkat juga, dan jika daya dukung lingkungan sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan penduduk maka tentu kondisi ketidakkumuhan akan terjadi, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan permukiman-permukiman kumuh, seperti terlihat di kelurahan teluk betung sebagai berikut.



Gambar 4.4. Contoh kondisi perumahan di kelurahan teluk betung

Untuk variabel tingkat kemiskinan [TKIN] nilai coef = 2,79171, *odds ratio* = 207,10 dan *P value* = 0,056, ini bermakna bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh secara positif ($P = 0,056$). Dalam hal ini jika kelurahan yang mempunyai tingkat kemiskinan pada katagori 1 berkembang menjadi katagori 2, maka tingkat kekumuhan meningkat menjadi 207,10 kali semula. Hal ini sesuai dengan teori kemiskinan Abraham Maslow dengan piramida kebutuhan manusia. Menurut Abraham Maslow manusia mempunyai lima kelompok kebutuhan . Kelima kelompok kebutuhan tersebut disusunnya berbentuk tingkatan-tingkatan atau disebut juga hirarki kebutuhan. Susunannya mulai dari yang paling penting hingga yang tidak penting dan dari yang mudah hingga yang sulit untuk dicapai atau didapat. Oleh sebab itu motivasi manusia kata Maslow sangat dipengaruhi oleh kebutuhan mendasar yang perlu terlebih dahulu dipenuhi. Untuk dapat merasakan nikmat suatu tingkat kebutuhan perlu dipuaskan dahulu kebutuhan yang berada pada tingkat di bawahnya. Maka teori ini sering juga disebut sebagai Piramida Maslow. Adapun urutan kelima kelompok kebutuhan itu seperti berikut:

1. Kebutuhan Fisiologis. Contohnya adalah : Sandang / pakaian, pangan / makanan, papan / rumah, dan kebutuhan biologis seperti buang air besar, buang air kecil, bernafas, dan lain sebagainya.
2. Kebutuhan Keamanan dan Keselamatan. Contoh seperti bebas dari penjajahan, bebas dari ancaman, bebas dari rasa sakit, bebas dari teror, dan lain sebagainya
3. Kebutuhan Sosial. Misalnya adalah : memiliki teman, memiliki keluarga, kebutuhan cinta dari lawan jenis, dan lain-lain.

4. Kebutuhan Penghargaan. Contoh pujian, piagam, tanda jasa, hadiah dan banyak lagi yang lainnya.
5. Kebutuhan Aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah kebutuhan dan keinginan untuk bertindak sesuka hati sesuai dengan bakat dan minatnya.

Meskipun banyak kritik tentang teori ini, namun secara umum mengandung fakta dalam kebanyakan kehidupan manusia. Dan Maslow sendiri dalam tahun-tahun terakhirnya merevisi teorinya tersebut (Stephen R. Covey dalam bukunya *First Things First*). Katanya, Maslow mengakui bahwa aktualisasi diri bukanlah kebutuhan tertinggi namun masih ada lagi yang lebih tinggi yaitu *self transcendence* yaitu hidup itu mempunyai suatu tujuan yang lebih tinggi dari dirinya. Mungkin yang dimaksud Maslow adalah kebutuhan mencapai tujuan hidup beragama. Sekarang lebih dikenal sebagai kebutuhan spiritual.

Variabel Pelayanan Air Bersih [PYSIH] (β_3) coef = 1,63526, Odds Ratio = 54,12 dan P value = 0,015 bermakna bahwa jika suatu kelurahan persentase pelayanan air bersih tidak terlayani meningkat dari katagori 1 menjadi katagori 2, dan dari katagori 2 menjadi katagori 3, maka tingkat kekumuhan kelurahan tersebut akan meningkat sebesar 54,12 kali semula. Kondisi ini sangat wajar karena air bersih merupakan kebutuhan vital untuk memenuhi kebutuhan manusia, jika kondisi air bersih di suatu tempat sangat minim maka tentu permukiman tersebut sangat jauh dari harapan untuk tidak menjadi permukiman kumuh. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya program pelayanan sarana air bersih harus senantiasa ditingkatkan oleh pemerintah agar masyarakat dapat hidup sehat dan tidak kumuh.



Gambar 4.5. Contoh kondisi pelayanan air bersih di kelurahan Srengsem

Variabel Ruang Terbuka [RT] meskipun dengan tingkat signifikansi 90 % (P value = 0,100), namun dengan odd ratio sebesar 59,47 menunjukkan pengaruh yang berarti besar, karena jika ruang terbuka dari kategori 1 menjadi kategori 2, atau dari kategori 2 menjadi 3, maka tingkat kekumuhan akan meningkat 59,47 kali semula. Hal ini menunjukkan pentingnya penghijauan di wilayah kota, sehingga tidak semua lahan menjadi bangunan-bangunan seluruhnya. Meskipun kadang terlihat ruang terbuka yang ada menjadi pembuangan sampah bagi orang-orang yang berperilaku buruk. Hal ini terlihat lebih jelas pada visualisasi sebagai berikut.



Gambar 4.6. Ruang terbuka yang kadang salahgunakan untuk membuang sampah

Odd ratio Kesesuaian Lahan [LT] sebesar 25, 23 artinya jika kesesuaian lahan berkembang dari katagori 1 menjadi katagori 2, dari katagori 2 menjadi katagori 3, maka tingkat kekumuhan akan meningkat 25,23 kali dari semula. Pada umumnya lahan untuk permukiman yang tidak sesuai dengan RUTR adalah di tepi rel kereta api, di bantaran sungai dan di dekat tegangan tinggi.



Gambar 4.7. Perumahan yang ada di tepi rel kereta api

Sedangkan untuk variabel tingkat pendidikan, kondisi jalan, rata-rata anggota rumah tangga, dan tingkat kerawanan keamanan ternyata dari hasil analisis regresi ordinal nilai P (P value) lebih besar dari 10 persen sehingga dapat dikatakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kekumuhan di daerah penelitian. Hal ini dimungkinkan karena tingkat pendidikan di wilayah pada umumnya seragam tidak ada perbedaan yang mencolok. Demikian juga ketiga variabel yang lain, meskipun memiliki pengaruh tetapi tidak nyata, karena baik kondisi jalan, tingkat kerawanan dan rata-rata anggota rumah tangga juga kebanyakan tidak mempunyai variasi antara masing-masing wilayah di daerah penelitian.

C. Analisis Uji Hipotesis

1. Uji Hipotesis pertama

Pengujian untuk melihat apakah ada perbedaan yang nyata antara wilayah non pesisir dengan wilayah pesisir digunakan Uji T-Test, dari hasil Uji T-Test (Lampiran IV), dapat dianalisis sebagai berikut:

Output hasil uji T-test dengan minitab 16.0 menunjukkan bahwa mean wilayah pesisir sebesar 2,798 dengan standart 0,202, sedangkan wilayah non pesisir mean sebesar 2,421 dengan standart deviasi 0,342, maka mean wilayah pesisir lebih tinggi dari mean wilayah non pesisir dengan selisih $-0,377$. Apakah besarnya selisih ini dapat membuktikan secara statistik bahwa ada perbedaan tingkat kekumuhan antara wilayah pesisir dan non pesisir, maka dipergunakan uji *independent t test*. Hasilnya nilai t hitung sebesar 3,20 pada *degree of freedom* (df) 28 dengan P value sebesar 0,003 dimana lebih kecil dari batas kritis 0,05

sehingga hipotesis yang menyatakan ada perbedaan nyata tingkat kekumuhan antara wilayah pesisir dan non pesisir terbukti dengan taraf signifikansi 95%.

2. Uji Hipotesis kedua

Untuk melihat adanya variasi tingkat kekumuhan, dilihat dari hasil perhitungan tingkat kekumuhan, dimana dari 30 kelurahan yang diteliti ada 10 kelurahan yang dikategorikan kumuh, 10 kelurahan agak kumuh, dan 10 kelurahan lagi dikategorikan tidak kumuh.

3. Uji Hipotesis ketiga

Untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi secara nyata terhadap tingkat kekumuhan dengan menggunakan analisis regresi logistik ordinal (hasil terlampir), maka yang mempengaruhi secara nyata terhadap tingkat kekumuhan dengan taraf kepercayaan 90% ada lima variabel yaitu: kepadatan penduduk (nilai koefisien sebesar 2,54, dengan $P\ value = 0,018$), tingkat kemiskinan (nilai koefisien sebesar 5,33, $P\ value = 0,056$), Pelayanan air bersih (nilai koefisien sebesar 3,99, $P\ value = 0,015$), Ruang Terbuka (nilai koefisien sebesar 4,08, $P\ value = 0,100$), dan Kesesuaian Lahan (nilai koefisien sebesar 3,22, $P\ value = 0,038$). Sedangkan variabel jumlah anggota rumah tangga, tingkat pendidikan, tingkat kerawanan keamanan, dan kondisi jalan tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat kekumuhan dengan nilai P masing-masing sebesar 0,706, 0,817, 0,369, dan 0,875.